

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Persidangan

A.1 Pengertian Persidangan

Persidangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu dengan kata dasar sidang yang artinya pertemuan untuk membicarakan sesuatu; rapat: -- *itu dihadiri oleh semua anggota*; segenap anggota. Dimana persidangan yaitu terdapat tambahan kata "per" di awal dan mendapat akhiran kata "an" yang artinya pertemuan segenap anggota untuk membicarakan sesuatu.

¹¹ Secara terminologi sidang adalah proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan musyawarah mufakat untuk menyelesaikan suatu masalah dengan syarat-syarat tertentu.

Dengan adanya penjelasan di atas menurut penulis, persidangan adalah suatu pertemuan dua atau lebih orang untuk menyelesaikan suatu masalah dengan cara musyawarah dan untuk mengambil suatu keputusan yang disepakati oleh pihak yang hadir.

Selain itu menurut Pasal 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Tata Tertib Persidangan yang berbunyi:

“Persidangan adalah sidang-sidang yang dilakukan oleh Mahkamah baik sidang panel maupun sidang pleno untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi”.

¹¹ <https://kbbi.web.id/sidang>

Jika dilihat dari penjelasan di atas menurut penjelasan dari KBBI, Terminologi, dan penjelasan dari Pasal 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Tata Tertib Persidangan. Menurut penulis persidangan adalah suatu proses penyelesaian masalah yang dihadiri dua atau lebih orang untuk menyelesaikan masalah dengan cara memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang dilakukan di pengadilan dimana persidangan tersebut digunakan untuk mencapai suatu mufakat.

A.2 Asas-Asas Dalam Persidangan

a. Asas Pemeriksaan Hakim yang Langsung dan Lisan

Pemeriksaan dalam sidang di pengadilan dilakukan oleh hakim secara langsung, arti langsung di sini adalah langsung kepada terdakwa dan para saksi. Hal tersebut sangat berbeda dengan acara perdata yang di mana tergugat dapat diwakili oleh kuasanya. Pemeriksaan oleh hakim juga dapat dilakukan secara lisan, artinya bukan tertulis sebagaimana antara hakim dan terdakwa. Dasar hukum mengenai ketentuan di atas diatur dalam Pasal 154,155 KUHAP, dan seterusnya.

Dari asas langsung tersebut yang dipandang sebagai pengecualian ialah kemungkinan dari putusan hakim yang dijatuhkan tanpa hadirnya terdakwa sendiri yaitu putusan verstek atau in absentia. Perlu digarisbawahi bahwa ini merupakan pengecualian yaitu dalam acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan

yang diatur dalam Pasal 213 KUHAP berbunyi: “*Terdakwa dapat menunjuk seseorang dengan surat untuk mewakilinya di sidang*”.

Begitu pula ketentuan yang ada dalam Pasal 214 KUHAP yang mengatur tentang acara pemeriksaan verstek tersebut. Ada pula dalam Hukum Acara Pidana khusus seperti Undang-Undang Nomor 7 (Darurat) Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi, dan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dikenal pemeriksaan pengadilan secara in absentia atau tanpa hadirnya terdakwa.¹²

b. Asas *Fair, Impartial, Impersonal, and Objective* (peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta bebas, jujur, dan tidak memihak)

Termuat dalam Pasal 2 ayat 4 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa: “*Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan*”.

“Sederhana” di sini artinya adalah, pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. “Biaya ringan” artinya adalah biaya perkara yang dapat di jangkau oleh masyarakat banyak.¹³ Isilah “Cepat” sendiri diartikan “segera”. Peradilan cepat sangat diperlukan terutama untuk menghindari penahanan yang lama sebelum ada keputusan hakim, hal tersebut

¹² Andi Hamzah. 1996. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sapta Artha Jaya. Jakarta. hal. 25-26

¹³ M. Bakri. 2011. *Pengantar Hukum Indonesia*. Malang. UB Press. hal. 148

tidak boleh lepas dari perwujudan hak asasi manusia. Begitu pula dengan peradilan bebas yang jujur, dan tidak memihak pihak manapun sebagaimana ditonjolkan dalam undang-undang tersebut.¹⁴

Selain itu hakim dalam memberikan putusan, bebas dari adanya campur tangan dan pengaruh dari pihak atau kekuasaan manapun.

c. Asas keterbukaan (sidang/pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum)

Pada prinsipnya, semua persidangan harus dinyatakan terbuka untuk umum, kecuali hal yang diatur dalam undang-undang. Perlu digaris bawahi sebelumnya, dinyatakan dengan tegas bahwa yang diartikan terbuka untuk umum adalah pemeriksaan pengadilannya, jadi pemeriksaan pendahuluan, penyidikan, dan praperadilan tidak terbuka untuk umum.¹⁵

Selanjutnya, di dalam Pasal 153 ayat (3) KUHP menyebutkan bahwa untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa anak-anak.¹⁶

Pada dasarnya, keterbukaan dari suatu proses peradilan diperlukan guna menjamin objektivitas dari pemeriksaan itu sendiri.

Bagaimanakah halnya jika sidang tidak dilakukan demikian? Hal ini

¹⁴ Andi Hamzah, *Opcit.*, hal. 12-13

¹⁵ M. Bakri, *Opcit.*, hal. 148.

¹⁶ Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hal. 20.

akan mengakibatkan putusan batal demi hukum, yang tercantum dalam Pasal 153 ayat (4) KUHAP, dan Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, karena terhadap semua perkara pidana, putusan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum jika diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Pasal 15 KUHAP).¹⁷

d. Asas *equality before the law* (asas persamaan di muka hukum)

Maksudnya adalah perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak membedakan latar belakang sosial, ekonomi, keyakinan politik, agama, golongan, dan sebagainya.¹⁸ Maksud perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan adalah bahwa di depan pengadilan kedudukan semua orang sama, maka mereka harus diperlakukan sama. Ketentuan atas asas tersebut dinyatakan dalam pasal 4 ayat 1 Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa, "Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang". Tujuan dari asas ini adalah agar memberikan jaminan kepada hak –hak asasi manusia yang mendapat perlindungan didalam negara yang berdasarkan Pancasila. Hal ini memberikan suatu jaminan hukum bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran atau perbuatan tindak

¹⁷ Mulyadi. 1999. *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana*. CV. Mandar Maju. Bandung. hal. 97

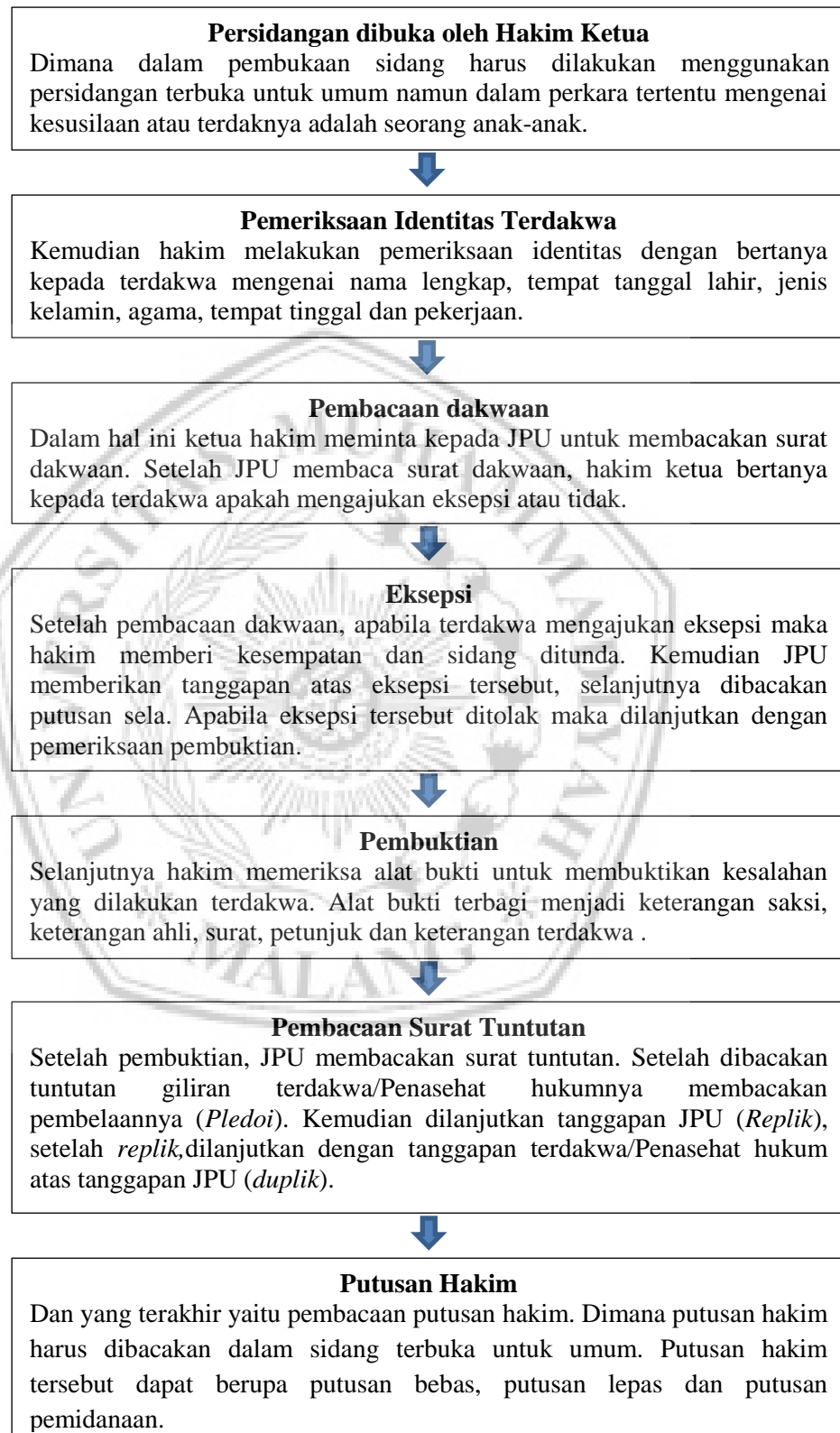
¹⁸ Aloysius Wisnubroto dan G. Widiartana. 2005. *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*. Citra Aditya Bakti. Bandung. hal. 11.

pidana yang memungkinkan sanksi hukum bagi yang melakukannya baik itu dilakukan oleh pejabat negara atau masyarakat biasa, apabila mereka melakukan perbuatan hukum. Maka digunakan sanksi hukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Ada juga untuk asas ini juga sering dipakai bahasa Sansekerta “tan hana dharma manrua” yang dijadikan motto Persaja (Persatuan Jaksa).¹⁹



¹⁹ Andi Hamzah, *Opcit.*, hal. 22.

A.3 Alur Proses Dalam Persidangan



A.4 Persidangan Terbuka Untuk Umum

Dalam perkara pidana, persidangan yang terbuka untuk umum pada dasarnya adalah hak terdakwa, yakni hak untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum.²⁰

Prinsip ini disebut juga dalam Pasal 153 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHP”):

“Untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa anak-anak.”

Tidak dipenuhinya ketentuan ini mengakibatkan batalnya putusan demi hukum.²¹

Menurut **Yahya Harahap**, hal ini bertujuan agar semua persidangan pengadilan jelas, terang dilihat dan diketahui masyarakat. Tidak boleh persidangan gelap dan bisik-bisik.²²

Tak hanya diatur di KUHP, Pasal 13 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (“UU 48/2009”) juga mengatur tentang persidangan terbuka untuk umum, yaitu:

1. Semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain.
2. Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
3. Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan **putusan batal demi hukum**.

²⁰ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

²¹ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

²² Yahya Harahap, *Opcit.*, hal 110

Jika dilihat dari penjelasan diatas menurut penulis sidang terbuka untuk umum dapat dilakukan untuk memeriksa semua kasus tindak pidana kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa anak-anak. Maka dari itu untuk memudahkan pembaca, penulis memberikan contoh seperti tindak pidana penculikan, pencurian, penganiayaan, pembunuhan dapat dilakukan menggunakan pemeriksaan sidang terbuka untuk umum.

A.5 Persidangan Tertutup Untuk Umum

Pengecualian sidang terbuka untuk umum (sidang dinyatakan tertutup untuk umum) pada umumnya adalah untuk kasus-kasus dalam ranah hukum keluarga, pidana anak, kasus kesusilaan dan beberapa kasus tertentu tertentu sebagaimana diatur dalam beberapa ketentuan berikut:

- a. Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (“UU PTUN”) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara:
“Apabila Majelis Hakim memandang bahwa sengketa yang disidangkan menyangkut ketertiban umum atau keselamatan negara, persidangan dapat dinyatakan tertutup untuk umum.”
- b. Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (“UU Peradilan Agama”) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama:
Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup.”

- c. Pasal 141 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (“UU Peradilan Militer”):

“Perkara yang menyangkut kesusilaan, rahasia militer dan/atau rahasia negara disidangkan secara tertutup”

- d. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (“UU SPPA”):

“Hakim memeriksa perkara Anak dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, kecuali pembacaan putusan.”

Pakar Hukum Acara Pidana Universitas Islam Indonesia (UII)

Mudzakkir menjelaskan ada beberapa hal yang perlu dipahami seputar definisi sidang tertutup untuk umum. Pertama, sidang tertutup tidak memperbolehkan masyarakat untuk masuk ke ruang sidang. makna lainnya adalah sidang tertutup juga tidak boleh dipublikasikan kepada publik. “Maknanya sidang tertutup untuk umum itu jangan dipublikasi ke umum juga. Wartawan tidak boleh mempublikasikan materi dalam persidangan kepada publik. Jadi sama juga, yang penting di sini umum tidak boleh masuk dalam konteks ini. Terus itu juga tidak dipublikasi kepada publik atau umum.

Pakar Hukum Acara Pidana Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Chairul Huda juga berpendapat senada. bahwa persidangan tertutup tidak hanya berarti melarang masyarakat umum melihat dan mendengar proses persidangan, tetapi juga para pihak tak boleh meng-ekspose. Chairul berpendapat bahwa materi persidangan merupakan rahasia jabatan, sehingga sudah otomatis materi yang berkaitan dengan sidang tertutup untuk umum tidak boleh disampaikan ke publik.²³

Jika melihat penjelasan di atas menurut penulis, sidang tertutup untuk umum artinya proses persidangan tersebut hanya diikuti dan

²³ Hukum Online, Sidang Tertutup Bukan Sekedar Larangan Masuk Ruang Sidang, dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54cef128994d1/sidang-tertutup--bukan-sekedar-larangan-masuk-ruang-sidang>, Akses 28 April 2018

dihadiri oleh pihak-pihak yang bersangkutan yaitu hakim, jaksa penuntut umum, penasehat hukum, panitera, terdakwa dan saksi. Dimana dalam sidang tertutup untuk umum ini ada larangan untuk masyarakat umum menghadiri sidang tersebut serta terdapat larangan untuk dipublikasi ke publik ataupun ke umum.

Meskipun pelaksanaan pemeriksaan dalam persidangan dilakukan menggunakan persidangan tertutup untuk umum, tetap suatu putusan hakim harus menggunakan persidangan terbuka untuk umum. Karena suatu putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Hal ini untuk mencapai suatu kepastian hukum bagi korban dan terdakwa. Serta untuk keadilan masyarakat luas.

A.6 Proses Persidangan Tindak Pidana Penculikan

Tindak Pidana penculikan yaitu suatu perbuatan dimana seseorang dengan niat menguasai atau mengambil seseorang secara paksa ataupun dengan tipu muslihat. Dimana untuk menahan seseorang atau menempatkan seseorang itu dibawah kekuasaannya. Dengan tujuan untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkannya , yaitu untuk suatu uang tebusan, dendam, menguasai harta benda, perdagangan anggota tubuh, perdagangan anak dan pemuasan nafsu. Dimana perbuatan penculikan tersebut dilarang dan diancam pidana. Menurut pasal 328 KUHPidana diancam dengan penjara paling lama dua belas tahun.

Jika dilihat dari pengertian tindak pidana penculikan di atas menurut penulis dalam tindak pidana penculikan tidak terdapat unsur kesusilaan dan terdakwa anak-anak. Sehingga jika dilihat dari asas keterbukaan (sidang/pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum), proses pemeriksaan tindak pidana penculikan tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan sidang terbuka untuk umum.

A.7 Proses Persidangan Tindak Pidana Perkosaan

Apabila berbicara tentang pemerkosaan, asosiasi pemikiran orang akan mengarah pada pelanggaran kesusilaan. Sementara itu istilah kesusilaan atau kesopanan diartikan sebagai perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin misalnya bersetubuh, meraba buah dada orang perempuan, meraba tempat kemaluan wanita, memperlihatkan anggota kemaluan wanita atau pria, mencium dan sebagainya.²⁴

Selain itu Prof. Mr. Roeslan Saleh mengemukakan, bahwa pengertian kesusilaan hendaknya tidak dibatasi pada pengertian kesusilaan dalam bidang seksual, tetapi juga meliputi hal-hal yang termasuk dalam penguasaan norma-norma kepatutan bertingkah laku dalam pergaulan masyarakat.²⁵

Berdasarkan pada uraian diatas, menurut penulis bahwa tindak pidana pemerkosaan tersebut termasuk sebagai perbuatan yang melanggar kesusilaan. Oleh karena itu pelaksanaan pemeriksaan

²⁴ Wirdjono Prodjodikoro. 1986. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesi*. Eresco. Bandung. hal 111

²⁵ Tongat. 2003. *Hukum Pidana Materiil*, Jakarta: Djambatan. hal. 109

persidangan dalam tindak pidana pemerkosaan harus dilakukan menggunakan persidangan tertutup untuk umum. Karena tindak pidana pemerkosaan memenuhi syarat sesuai dengan asas keterbukaan (sidang/pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum) yang diatur dalam Pasal 153 KUHAP bahwa untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan dan terdakwanya anak-anak.

B. Tindak Pidana Perbarengan (*Concursus*)

B.1 Pengertian Tindak Pidana *Concursus*

Tindak Pidana Concursus diatur dalam pasal 63 sampai dengan 71 KUHP. Dalam KUHP gabungan melakukan tindak pidana sering diistilahkan dengan *Samenloop van Stratbare Feiten* yaitu satu orang yang melakukan beberapa peristiwa pidana.²⁶

Pada dasarnya yang dimaksud dengan perbarengan ialah terjadinya dua atau lebih tindak pidana oleh satu orang dimana tindak pidana yang dilakukan pertama kali belum dijatuhi pidana, atau antara tindak pidana yang awal dengan tindak pidana berikutnya belum dibatasi oleh suatu putusan hakim. Pada pengulangan juga terdapat lebih dari suatu tindak pidana yang dilakukan oleh satu orang. Perbedaan pokoknya ialah bahwa pada pengulangan tindak pidana yang dilakukan pertama

²⁶ E. Utrecht. 1994. *Hukum Pidana II*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas. hal 137

atau lebih awal telah diputus oleh hakim dengan mempidana pada si pembuat, bahkan telah dijalaninya baik sebagian atau seluruhnya. Sedangkan pada perbarengan syarat seperti pada pengulangan tidaklah diperlukan.²⁷

B.2 Macam-Macam Tindak Pidana *Concursus*

Dalam rumusan pasal, KUHP tidak memberikan definisi perbarengan tindak pidana *conkursus* ini. Namun demikian, dari rumusan pasal-pasal nya, dapat diperoleh pengertian dan sistem pemberian pidana bagi *conkursus* sebagai berikut.

Gabungan perbuatan yang dapat dihukum mempunyai tiga bentuk, *conkursus* ini diatur didalam KUHP Bab. VI, adalah sebagai berikut :

1. *Conkursus Idealis* (Pasal 63 KUHP)

Pengertian dari *conkursus idealis* adalah suatu perbuatan yang masuk kedalam banyak (Lebih dari satu) aturan pidana. Selain itu menurut Taverne *Conkursus Idealis* apabila dipandang dari sudut hukum pidana ada dua perbuatan atau lebih; antara perbuatan-perbuatan itu tidak dapat dipikirkan terlepas satu sama lain.

Gabungan satu perbuatan atau *conkursus idealis* diatur dalam pasal 63 ayat (1) KUHP yang berbunyi

“apabila satu perbuatan memenuhi lebih dari satu ketentuan pidana, maka hanya diperlakukan satu ketentuan pidana saja, dalam hal hukumannya berlainan, dipergunakan

²⁷ Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Hal. 109.

satu ketentuan pidana dengan hukuman pokoknya yang terberat”.

Ketentuan dalam Pasal 63 ayat (1) KUHP tersebut memperlakukan asas absorpsi murni. Dasar ketentuan tersebut adalah bahwa ternyata seseorang yang melakukan sesuatu tindak pidana yang di ancam dengan hukuman yang berat, akan lebih berani melakukan sesuatu tindak pidana yang diancam dengan hukuman yang ringan. Karenanya terhadap gabungan satu perbuatan itu harus dijatuhkan hukuman yang terberat di antara hukuman yang di ancam.²⁸

2. Perbuatan Berlanjut (Pasal 64 KUHP)

Pengertian dari *concursum berlanjuti* adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang atau berangsur-angsur dimana perbuatan itu sejenis berhubungan dan dilihat dalam satu perbuatan.

Perbuatan berlanjut menunjukkan perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum yang masing-masing merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri, diantara perbuatan-perbuatan yang saling berhubungan satu sama lain secara erat. Pada perbuatan lanjutan ini tiap-tiap perbuatan yang dapat dihukum mempunyai tempat sendiri dan jangka waktu kadaluarsa sendiri. Hal ini sesuai dengan perumusan dalam pasal 64 KUHP yang berbunyi:

- (1) Jika beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, maka hanya satu ketentuan pidana saja yang digunakan walaupun masing - masing perbuatan itu menjadi

²⁸ Dr. Teguh Prasetyo, 2010. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. hal 114.

kejahatan atau pelanggaran. Jika hukumannya berlainan maka yang digunakan ialah peraturan yang terberat hukuman utamanya.

- (2) Begitu juga hanya digunakan satu ketentuan pidana saja, bila orang dipersalahkan memaksu atau merusakkan uang dan memakai benda untuk melakukan perbuatan memalsu atau merusak uang.
- (3) Akan tetapi jika kejahatan yang diterangkan dalam pasal 364, 373, 379 dan ayat pertama dari pasal 407, dilakukan sebagai perbuatan yang diteruskan dan jumlah dari harga kerugian atas kepunyaan orang lantaran perbuatan terus menerus itu semua lebih dari Rp 25, maka masing - masing dihukum menurut ketentuan pidana dalam pasal 362, 372, 378 dan 406.

Delik berlanjut apabila :

- a. Seorang melakukan beberapa perbuatan
- b. Perbuatan itu merupakan kejahatan atau pelanggaran sendiri
- c. Antara perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut.

Dengan mempergunakan dasar-dasar yang dikemukakan oleh MvT, telah ditetapkan beberapa syarat bagi perbuatan berlanjut :

- a. Harus ada kesatuan kehendak
- b. Perbuatan-perbuatan itu harus sama atau sejenis
- c. Jangka waktu antara berbagai perbuatan itu tidak boleh berlangsung terlalu lama.²⁹

3. Concursus Realis (Pasal 65 – 71 KUHP)

Pengertian concursus realis adalah seseorang melakukan beberapa perbuatan, dan masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri. Sebagai suatu tindak pidana (tidak perlu sejenis dan tidak perlu berhubungan).

Yang dimaksudkan dengan gabungan beberapa perbuatan (*consurcus realis*) adalah: “apabila seseorang melakukan beberapa

²⁹ Dr. Teguh Prasetyo. Opcit, hal. 115-116.

perbuatan, perbuatan-perbuatan mana berdiri sendiri dan masing-masing merupakan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan pidana yang berupa kejahatan dan/atau pelanggaran terhadap kejahatan dan/atau pelanggaran mana yang belum ada yang dijatuhkan hukuman oleh pengadilan dan akan diadili sekaligus oleh pengadilan”.

Jadi dalam *concursum realis* terdapat:

- a. Seorang pembuat;
- b. Serentetan tindak pidana yang dilakukan olehnya;
- c. Tindak pidana itu tidak perlu sejenis atau berhubungan satu sama lain;
- d. Di antara tindak pidana itu tidak terdapat keputusan hakim.

Terhadap *concursum realis* ini diperlakukan asas-asas hukuman yang berbeda dengan *concursum idealis*. Dalam penggunaan asas ini dibedakan sebagai berikut:

- a. Kejahatan yang diancam dengan hukuman pokok yang sejenis.

Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 65 KUHP hanya dijatuhkan satu hukuman yang diperoleh dari jumlah hukuman pokok yang diancamkan atas beberapa perbuatan tersebut, tetapi tidak boleh melebihi hukuman maksimum yang terberat ditambah sepertiga.

Asas-asas yang dipergunakan disini bukan pemberatan hukuman, tetapi pengurangan hukuman. Asas yang dipergunakan adalah absorpsi yang dipertajam, disebut absorpsi karena satu hukuman dijatuhkan dan dipertajam berhubung hukumannya ditambah $\frac{1}{3}$ nya di atas maksimum yang terberat.

b. Kejahatan yang diancam dengan hukuman pokok yang tidak sejenis

Apabila berupa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, maka semua jenis ancaman pidana untuk tiap-tiap kejahatan dijatuhkan, tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum pidana terberat ditambah sepertiga. Sistem ini dinamakan sistem kumulasi diperlunak. Karena semua jenis pidana harus dijatuhkan.³⁰

B.3 Batasan, Bentuk dan Syarat Tindak Pidana *Concursus*

Dalam bukunya E.Y.Kanter dan S.R. Sianturi terdapat batasan, bentuk dan syarat syarat dari *concursus* yaitu:³¹

1. Batasan *Concursus*
 - a. Satu tindakan yang dilakukan (aktif/passif) oleh seseorang yang dengan tindakan tersebut terjadi dua/lebih tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam perundangan.
 - b. Dua atau lebih tindakan yang dilakukan (aktif/passif) oleh seorang, yang dengan itu telah terjadi dua atau lebih tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam perundangan.
 - c. Dua atau lebih tindakan yang dilakukan (aktif/passif) oleh seseorang secara berlanjut yang dengan itu telah terjadi dua kali atau lebih tindakan pidana (pada umumnya sejenis)
2. Bentuk-bentuk dalam *Concursus*
 - a. Perbarengan tindakan tunggal atau perbarengan ketentuan pidana (*concursus idealis*)
 - b. Perbarengan tindakan jamak atau perbarengan tindak-tindak pidana (*concursus realis*)
 - c. Perbarengan tindakan berlanjut
3. Syarat-syarat dalam *Concursus*
 - a. Ada dua/lebih tindak pidana (sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang) dilakukan
 - b. Bahwa dua/lebih tindak pidana tersebut dilakukan oleh satu orang (atau dua orang/lebih dalam rangka penyertaan)
 - c. Bahwa dua/lebih tindak pidana tersebut, belum ada yang diadili

³⁰ *Ibid.* hal 116-119

³¹ E.Y. Kanter, SH dan S.R Sianturi, SH. 2002. *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapanny*. Jakarta: Storia Grafika. 2002. hal 391

d. Bahwa dua/lebih tindak pidana tersebut akan diadili sekaligus³²



³² Fuad Purwanto, *Pengertian Tindak Pidana Perbarengan (Concursu)s*, dalam http://www.academia.edu/8737569/Pengertian_Concursus , akses tanggal 28 April 2018